

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin (GAPRI, 2003). Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari pengeluaran. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro, 2006). Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Komitmen dunia internasional dalam penanggulangan kemiskinan tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh 193 negara pada September 2015. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, seperti bantuan tunai untuk masyarakat “*top down*” hingga program pemberdayaan masyarakat lainnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang akurat dan “tepat sasaran”. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya

dapat menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Angka kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Komitmen dunia Internasional dalam penanggulangan kemiskinan tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan pertama SDGs adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan diakui sebagai permasalahan utama dalam pembangunan global dengan sasaran mengurangi. Seluruh Negara di dunia yang menandatangani deklarasi harus dapat mengurangi setengah dari penduduknya yang berpenghasilan kurang dari US \$ 1 per hari dan penduduk yang mengalami kelaparan. Tujuan dari SGDs menjadi referensi bagi semua Negara termasuk Indonesia untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Oleh karena itu dalam menanggulangi kemiskinan tersebut perlu adanya data dan informasi yang akurat, selain itu juga perlu adanya peramalan sebagai dasar dalam merumuskan kebijaksanaan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dimasa yang akan datang. Sehingga pengukuran dan peramalan mengenai kemiskinan sangat diperlukan bagi pemerintah.

Ada banyak metode-metode yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah. Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. BPS menggunakan

konsep kemampuan kebutuhan dasar (*basic need approach*), dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan dan non makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan yaitu tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1 per hari per kapita.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Adapun indikator – indikator kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik dan mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Jawa Barat, sebagai gambaran mengenai perkembangan kondisi kemiskinan, periode tahun 2012 - September 2017, tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian pada September 2013, dan tahun 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2012 – 2017 bisa dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2012 – 2017 (Ribu Jiwa)

No	Kabupaten / Kota	Tahun					
		2012*)	2013*)	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor	451	499,1	479,09	487,1	490,8	487,28
2	Sukabumi	234,6	222,8	213,52	217,86	198,66	197,12
3	Cianjur	292,2	267,9	256,6	273,9	261,39	257,41
4	Bandung	279,5	271,7	266,76	281,04	272,65	268,02
5	Garut	315,8	320,9	315,58	325,67	298,52	291,24
6	Tasikmalaya	201,5	199,3	194,76	208,12	195,61	189,35
7	Ciamis	147,8	133	130,03	104,87	98,77	96,76
8	Kuningan	142,3	139,4	133,57	147,21	144,07	141,55
9	Cirebon	311,3	307,2	300,53	313,21	288,49	279,55
10	Majalengka	168,6	164,9	158,01	167,5	152,5	150,26
11	Sumedang	132,9	127,4	122,04	129,03	120,6	120,63

12	Indramayu	257,3	251,1	240,68	253,12	237	233,38
13	Subang	185,4	185,4	177,94	187,17	170,37	167,79
14	Purwakarta	85	83,6	80,31	83,94	83,55	85,25
15	Karawang	245,1	238,6	228,99	235,03	230,6	236,84
16	Bekasi	153,1	157,7	156,57	169,2	164,41	163,95
17	Bandung Barat	209,9	206	197,9	205,69	192,48	190,89
18	Pangandaran	-	-	-	41,97	40,14	39,46
19	Kota Bogor	84,8	83,3	80,12	79,15	77,28	76,53
20	Kota Sukabumi	26	25,2	24,14	27,84	27,51	27,41
21	Kota Bandung	111,4	117,7	115	114,12	107,58	103,98
22	Kota Cirebon	33,2	31,9	30,6	31,74	30,15	30,19
23	Kota Bekasi	139,8	137,8	139,7	146,94	140,03	136,01
24	Kota Depok	47	45,9	47,54	49,97	50,56	52,34
25	Kota Cimahi	37,7	32,3	31,78	34,09	35,07	34,53
26	Kota Tasikmalaya	123	112,2	104,54	106,78	102,79	97,85
27	Kota Banjar	13,9	12,8	12,68	13,42	12,74	12,87
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>4.430,20</b>	<b>4.375,20</b>	<b>4.238,96</b>	<b>4.435,70</b>	<b>4.224,33</b>	<b>4.168,44</b>

Sumber : Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2012-2017

Keterangan: \*) diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

Salah satu sebab kurangnya penanggulangan terhadap kemiskinan pada suatu wilayah karena kurangnya informasi mengenai kemiskinan. Untuk itu diperlukan suatu metode untuk mengetahui keberadaan kemiskinan di masa yang akan datang, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan suatu penelitian tentang peramalan Garis Kemiskinan untuk waktu yang akan datang, sebagai peringatan dini pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan, karena Garis Kemiskinan merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Tujuan dari penelitian ini adalah **“Melakukan peramalan Garis Kemiskinan dengan menggunakan Metode *Double Exponential Smoothing* dari *Holt*”**. Metode yang digunakan yaitu untuk data yang mempunyai *trend linier* yang menunjukkan persamaan garis lurus yang terbentuk

berdasarkan titik-titik diagram pencar dari data selama periode waktu tertentu. Model *trend* biasanya digunakan untuk memprediksi suatu ramalan jangka panjang.

Peramalan ini sangat diperlukan untuk mengetahui yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan sebagai dasar untuk membuat rencana dan kebijaksanaan dalam mengantisipasi berbagai fenomena kemiskinan. Peramalan merupakan suatu taksiran yang ilmiah meskipun akan terdapat sedikit kesalahan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia.

Pertimbangan dalam melakukan peramalan mengenai Garis Kemiskinan muncul karena berbagai faktor diantaranya karena faktor pertumbuhan penduduk, pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta garis kemiskinan ini sangat diperlukan sebagai salah satu variabel dalam penghitungan jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah. Untuk melakukan peramalan ada beberapa cara, salah satunya dengan model *time series*, model ini sangat bermanfaat untuk memprediksi ketidakpastian di masa yang akan datang, dengan menjadikan data masa lalu sebagai dasar untuk melakukan peramalan untuk waktu yang akan datang.

Salah satu metode yang digunakan dalam melakukan peramalan dengan menganalisa data dengan model *time series* adalah metode *Double Exponential Smoothing*. Metode ini dibagi menjadi dua yaitu *Double Exponential Smoothing* satu parameter dari *Brown* dan *Double Exponential Smoothing* dua parameter dari *Holt*. *Double Exponential Smoothing* dari *Brown* merupakan model linear yang dikemukakan oleh Brown. Didalam metode ini dilakukan proses *smoothing* dua kali.

Metode ini dapat dihitung dengan tiga nilai data dan satu parameter alpha. Pendekatan ini juga memberikan bobot yang semakin menurun pada observasi masa lalu. *Double Exponential Smoothing* dari Holt dalam prinsipnya sama dengan Brown, kecuali Holt tidak menggunakan rumus *Double Exponential Smoothing* secara langsung. Sebagai gantinya Holt memuluskan nilai *trend* dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret asli. Model peramalan dari *Double Exponential Smoothing* dari Holt didapat dengan menggunakan dua parameter pemulusan yaitu alpha dan gamma.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Peramalan Garis Kemiskinan menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* dapat memberikan data dan informasi kepada *stakeholder*.
2. Peramalan Garis Kemiskinan sebagai dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dan sebagai rujukan data bagi para *stakeholder*, terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka mengendalikan Garis Kemiskinan.
3. Bagaimana mengetahui keberadaan kemiskinan dimasa yang akan datang sehingga langkah penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan guna mengevaluasi kebijakan pemerintahan terhadap kemiskinan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengembangkan model peramalan Garis Kemiskinan dengan menggunakan *Double Exponential Smoothing* dari Holt". Adapun tujuan penelitian ini secara lebih luas adalah sebagai berikut :

1. Meramalkan Garis Kemiskinan di Jawa Barat menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* dari *Holt* periode tahun 2018 – 2020.
2. Mengetahui kinerja model peramalan Garis Kemiskinan dengan menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* dari *Holt*.
3. Menghasilkan data Garis Kemiskinan untuk masa yang akan datang sebagai keperluan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
4. Menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang Garis Kemiskinan di Jawa Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan sebuah model usulan yang dapat meramalkan Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis mengenai informasi Garis Kemiskinan kepada pemerintah dan para *stakeholder* sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dalam pengambilan keputusan mengenai penanggulangan kemiskinan.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain, dalam memproyeksi Garis Kemiskinan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk membatasi kajian penelitian agar lebih spesifik dan terarah, maka penelitian dibatasi pada pembahasan sebagai berikut :

1. Model peramalan Garis Kemiskinan menggunakan metode *Double Exponential Smoothing* dari *Holt*.
2. Model peramalan menggunakan data Garis Kemiskinan di Jawa Barat periode tahun 2005 - 2017.
3. Model peramalan ini di olah berdasarkan data makro kemiskinan.
4. Untuk keperluan peramalan, penelitian ini menggunakan Data Garis Kemiskinan yang telah dihitung oleh BPS Provinsi Jawa Barat.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibagi kedalam beberapa bab untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terstruktur. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan deskripsi dari literature yang digunakan pada penelitian.

**c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dan juga penjelasan mengenai objek penelitian yang digunakan.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga menghasilkan suatu strategi BI sesuai dengan yang diharapkan.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.